

BAB IV

PERANAN CPM DALAM TENTARA NASIONAL INDONESIA

A. Periode Perang Kemerdekaan (tahun 1945-1949)

Proklamasi Kemerdekaan yang diproklamlirkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta memiliki makna yang sangat penting bagi rakyat Indonesia dimana dengan proklamasi tersebut menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah lahir sebagai suatu negara yang berdaulat. Proklamasi kemerdekaan disambut oleh seluruh rakyat di seluruh Indonesia walaupun waktu penyampaian mengenai proklamasi tersebut berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Hal ini terjadi karena pada waktu itu sarana komunikasi yang ada belum menjangkau seluruh wilayah yang berada di wilayah terpencil atau pedalaman.

Kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia bukan pemberian dari bangsa lain tetapi merupakan hasil dari jerih payah dan semangat yang tidak mengenal lelah rakyat dalam melakukan perlawanan-perlawanan terhadap kaum penjajah yang menguasai nusantara ini. Kemerdekaan merupakan jembatan emas yang menuju cita-cita luhur bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut masih diperlukan kerja sama dari seluruh rakyat dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang menghalanginya. Tantangan dan hambatan yang masih harus dihadapi bangsa Indonesia setelah kemerdekaan yaitu masih terdapat pasukan Jepang di Indonesia, kedatangan pasukan Sekutu yang turut serta

membawa pasukan Belanda (NICA). Kedatangan pasukan Belanda tersebut dengan tujuan dapat menguasai kembali Indonesia yang pernah menjadi wilayah jajahannya.

Seluruh rakyat tidak berdiam diri saja melihat kedatangan pasukan Belanda, mereka harus kembali berjuang dengan menggunakan senjata untuk mengamankan dan mempertahankan keutuhan bangsa dari penjajah. Semangat rakyat untuk mengusir bangsa lain dari Indonesia kian menggetarkan di seluruh wilayah Indonesia. Para pemuda meminta pemerintah untuk secepatnya mendirikan organisasi tentara kebangsaan. Setelah melakukan sidang rapat anggota PPKI memutuskan akan membentuk organisasi tentara kebangsaan. Akan tetapi untuk menghindari terjadinya perang antara rakyat dengan pasukan Jepang, Sekutu dan Belanda, yang secara taktis terdapat dalam pemikiran pemerintah bahwa akan banyak rakyat yang mati dalam perang karena tidak seimbangny kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bila dibandingkan ketiga pasukan tersebut. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, sehingga pemerintah membentuk organisasi tentara kebangsaan secara samar-samar yaitu dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai cikal bakal lahirnya tentara kebangsaan.

Pemerintah meresmikan berdirinya BKR pada tanggal 23 Agustus 1945, dengan antusias yang tinggi rakyat Indonesia terutama para pemuda mendaftarkan diri sebagai anggota BKR di daerahnya masing-masing. Tetapi juga ada sebagian rakyat yang merasa kecewa karena pemerintah tidak secara langsung membentuk organisasi tentara kebangsaan. Kekecewaan tersebut membuat mereka mendirikan organisasi badan-badan perjuangan yang lebih dikenal dengan istilah laskar. Dengan adanya dua organisasi tentara kebangsaan tersebut membuat sering kali terjadi kesalahpahaman antara anggota BKR dengan anggota laskar maupun anggota BKR dengan anggota BKR ataupun sebaliknya.

Untuk menghindari terus terjadinya masalah kesalahpahaman tersebut yang merugikan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan sehingga pemerintah memutuskan dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terdiri dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Penyempurnaan organisasi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dilakukan pemerintah untuk membentuk sebuah organisasi tentara kebangsaan yang tangguh. Organisasi tentara kebangsaan atau tentara nasional selalu berganti nama mulai dari Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), selanjutnya menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Saat pembentukan divisi-divisi dalam berbagai angkatan yang masih bagian dari tubuh Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Letnan Jenderal Urip Sumoharjo yang merupakan Kepala Staf Umum Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat, memerintahkan agar di tiap-tiap divisi dibentuk Polisi Tentara. Polisi Tentara memiliki tugas sebagai pengatur tata tertib disiplin, dan penegak hukum di lingkungan militer (menyelidiki, mengusut, dan menuntut perkara-perkara dimuka Pengadilan Tentara, Divisi, maupun Resimen TKR). Seiring berjalannya waktu, organisasi Polisi Tentara mengalami penyempurnaan. Hal ini ditandai dengan diubahnya nama Polisi Tentara menjadi Corps Polisi Militer.

Bersama-sama dengan rakyat dan satuan TNI lainnya, Corps Polisi Militer ikut terlibat dalam kancah peperangan melawan pasukan Belanda guna mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dari ancaman bahaya yang terjadi dengan masuknya bangsa asing. Semasa periode perang kemerdekaan ini peranan yang telah ditunjukkan oleh CPM antara lain ikut berperang menghadapi serangan pasukan Belanda pada agresi militer I (tahun 1947) dan agresi II (tahun 1948). Dalam perang kemerdekaan ini satuan CPM, tidak hanya ikut sebagai pasukan tempur tetapi juga sebagai petugas pengawal bagi orang-orang yang memiliki kedudukan penting seperti pengawalan perjalanan gerilya Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Kemudian ikut bertempur dalam Front Medan Area dan perjuangan lainnya di Sumatera. Melaksanakan tugas pengawalan Presiden sejak tanggal 3 Juli 1947, yang dilaksanakan oleh Batalyon Mobil II CPM. Dan juga CPM ikut serta dalam penumpasan pemberontakan PKI di Madiun yang terjadi pada bulan September 1948. Selain itu satuan CPM juga mendapat kehormatan dan kepercayaan dari pemerintah untuk melaksanakan tugas internasional yaitu pengawalan kembali tentara Jepang dan pengembalian tawanan atau intewran perang sekutu.

B. Periode Tahun 1950-1959

Setelah CPMD dan CPMS dihapus menjadi CPM dan Markas Besarnya yang semula di Yogyakarta dialihkan ke Jakarta maka sejak tanggal 31 Mei 1950 nama Markas Komando Corps Polisi Militer diubah menjadi Markas Besar Polisi Militer. Konsolidasi organisasi di lingkungan CPM terus dilakukan mengikuti reorganisasi yang dilakukan oleh TNI-AD. Hasil dari konsolidasi ini adalah ditetapkan 7 Batalyon CPM untuk seluruh Indonesia pada tanggal 28 November 1950. Selain 7 Batalyon tersebut, dibentuk pula Batalyon Rajasa yaitu satuan khusus CPM yang dapat digerakkan dalam waktu cepat. Batalyon ini terdiri dari 4 Kompi.

Pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat ini, CPM tidak saja berperan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban akan tetapi juga bertugas sebagai satuan tempur dalam menumpas berbagai pemberontakan yang terjadi di tanah air seperti pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dan Jawa Tengah, APRA di Sulawesi Selatan dan Bandung,

Andi Aziz di Sulawesi Selatan, Republik Maluku Selatan di Maluku serta pemberontakan Angkatan Umat Islam di Jawa Tengah. Di samping itu satuan CPM mendapat kehormatan dan kepercayaan dari pemerintah untuk melaksanakan tugas pengawalan dan pengamanan jalannya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1952.

C. Periode 1959-1965

Pada periode ini penataan organisasi CPM terus dilakukan. Wujud dan penataan organisasi ini adalah dibentuknya Direktorat Polisi Militer pada tanggal 12 Desember 1959. Direktorat Polisi Militer merupakan Badan Pelaksana Utama di tingkat Departemen Angkatan Perang yang mempunyai tugas pokok dari segi administrasi bagi Polisi Militer Angkatan Darat.

Dalam periode ini beberapa operasi keamanan dalam negeri yang pernah diikuti oleh satuan CPM adalah ikut serta dalam Operasi Trikora di Irian Barat pada tahun 1961-1962, serta Operasi Dwikora di Malaysia tahun 1963-1964. Dan yang tidak kalah pentingnya CPM pun sangat berperan dalam penumpasan gerombolan Andi Sale di Sulawesi Selatan tahun 1964. Sedangkan tugas Internasional yang bernah diemban oleh satuan CPM adalah sebagai anggota kontingen Garuda II tahun 1960 dan Garuda III tahun 1961, yaitu melaksanakan misi sebagai pasukan perdamaian PBB di negara Kongo. Selain itu satuan CPM juga dilibatkan dalam penyusunan petunjuk pengendalian huru-hara pada tahun 1959.

D. Periode tahun 1966-1971

Di awal orde baru, penataan organisasi ABRI diarahkan pada upaya integrasi kelembagaan. Melalui Keputusan Presiden RI No. 79 Tahun 1969 dilakukan penyempurnaan organisasi ABRI dimana dalam struktur organisasi ABRI tersebut kelembagaan Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (POM ABRI). Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden tersebut, Menhankam/Pangab mengeluarkan Surat Keputusan No. Kep/A/7/III/1971 tentang pembentukan organisasi POM ABRI. Keberadaan POM ABRI ini membawa dampak terjadinya perubahan dalam struktur organisasi Polisi Militer Angkatan Darat. Untuk itu melalui Keputusan Kasad No. Kep/45/II/1972 tanggal 5 Februari 1972 ditetapkan organisasi Dinas Provoost Angkatan Darat (Disprovad). Sementara itu beberapa peranan CPM dalam era orde baru meliputi antara lain :

bersama dengan satuan ABRI lainnya melaksanakan tugas penumpasan pemberontakan PKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Tugas yang dilaksanakan antara lain melakukan penangkapan, pemeriksaan dan pengamanan sidang terhadap tokoh-tokoh PKI yang terlibat dalam G 30 S/PKI.

Ikut serta dalam berbagai operasi keamanan dalam negeri lainnya seperti penumpasaan PGRS/Paraku di Kalimantan Barat tahun 1972, operasi Seroja di Timor Timur tahun 1975 dan penumpasan gerakan pengacau Hasan Tiro di Aceh tahun 1977.

Ikut serta dalam penugasan Internasional sebagai pasukan penjaga perdamaian di bawah payung PBB antara lain di Vietnam Selatan tahun 1973 dan di Timur Tengah tahun 1973-1975. Tugas pengawalan dan pengamanan Presiden di awal tahun orde baru juga melibatkan CPM di dalamnya. Dimulai dengan pembentukan Satgas Pomad pada tahun 1966 hingga pembentukan Paswalpres 1976.